OPTIMALISASI PEMANFAATAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI PRODUKTIF MASYARAKAT PESISIR DI KAMPUNG MAIMARI KABUPATEN TELUK WONDAMA PROVINSI PAPUA BARAT

Zevania Inas Sawo
NPP. 33.1217
Program Studi Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat
Email: zevania.sawo@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Muhammad Faisal, S.Pd., M.Pd
Email: faisalmile69@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement : *The utilization of Village Funds in Maimari Village, Teluk Wondama Regency, West Papua Province has not fully supported the productive economic empowerment of coastal communities. Village Fund allocations are still dominated by physical infrastructure development, while economic empowerment programs for fishermen, MSME actors, and community business groups have not been implemented optimally. In addition, limited human resource capacity, restricted access to capital and markets, and low community participation in program planning and supervision have hindered the achievement of community economic independence.* ***Purpose:*** *This study aims to examine the optimization of Village Fund utilization in the productive economic empowerment of coastal communities in Maimari Village, Teluk Wondama Regency, West Papua Province.* ***Method:*** *This study employed a descriptive qualitative method with a case study approach. The analysis was based on Anwas's community empowerment theory, which includes human resource capacity, community participation, access to resources, and strengthening of local institutions. Data were collected through interviews, observation, and documentation involving village officials, BUMKam managers, village facilitators, community leaders, fishermen, MSME actors, and Village Fund beneficiaries.* ***Result:*** *The findings show that Village Funds have been utilized for entrepreneurship training, MSME development, and strengthening BUMKam. Community capacity building has been carried out through various training programs, although not yet sustainably. Community participation in program implementation is relatively good, but remains low in the planning and monitoring stages. Economic facilities and business assistance have been provided; however, access to capital and marketing remains limited. BUMKam has contributed to supporting community economic activities, but its role has not been fully optimized due to limited managerial capacity and business innovation.* ***Conclusion:*** *This study concludes that the optimization of Village Fund utilization in the productive economic empowerment of coastal communities in Maimari Village has been implemented, but has not yet been optimal in terms of community capacity, participation, access to resources, and strengthening of local institutions.*

Keywords: *Coastal Communities; Community Participation; Local Potential; Productive Economic Empowerment; Village Funds.*

ABSTRAK

Permasalahan : Pemanfaatan Dana Desa di Kampung Maimari, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat belum sepenuhnya mampu mendorong pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat pesisir. Alokasi Dana Desa masih didominasi pembangunan fisik, sedangkan program pemberdayaan ekonomi bagi nelayan, pelaku UMKM, dan kelompok usaha masyarakat belum optimal. Selain itu, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan akses modal dan pemasaran, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan program menjadi kendala dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi pemanfaatan Dana Desa dalam pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat pesisir di Kampung Maimari, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat. **Metode:** Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Analisis dilakukan berdasarkan teori pemberdayaan masyarakat Anwas yang meliputi kapasitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, akses terhadap sumber daya, dan penguatan kelembagaan lokal. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri atas aparat kampung, pengelola BUMKam, pendamping desa, tokoh masyarakat, nelayan, pelaku UMKM, dan penerima manfaat Dana Desa. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan Dana Desa telah diarahkan pada pelatihan usaha, pengembangan UMKM, dan penguatan BUMKam. Peningkatan kapasitas masyarakat telah dilakukan melalui pelatihan, namun belum berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program cukup baik, tetapi masih rendah pada tahap perencanaan dan pengawasan. Dukungan sarana dan bantuan usaha telah diberikan, namun akses permodalan dan pemasaran masih terbatas. BUMKam berperan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, tetapi belum optimal karena keterbatasan kapasitas manajerial dan inovasi usaha. **Kesimpulan:** Optimalisasi pemanfaatan Dana Desa dalam pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat pesisir di Kampung Maimari telah berjalan, namun belum optimal pada aspek kapasitas masyarakat, partisipasi, akses sumber daya, dan penguatan kelembagaan lokal.
Kata kunci: Dana Desa; Masyarakat Pesisir; Partisipasi Masyarakat; Pemberdayaan Ekonomi Produktif; Potensi Lokal.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan desa merupakan salah satu prioritas utama dalam penyelenggaraan pembangunan nasional di Indonesia (Nainggolan et al,2022). Desa sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan, pemerataan pembangunan, serta pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi (Salahudin,2022). Keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya ditentukan oleh kemajuan wilayah perkotaan, tetapi juga oleh kemampuan desa dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pembangunan desa diarahkan tidak hanya pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat, pemberdayaan ekonomi, serta pengembangan kelembagaan desa. Komitmen pemerintah dalam memperkuat

pembangunan desa diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan yang lebih luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat. Salah satu bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan desa adalah melalui kebijakan Dana Desa yang mulai disalurkan sejak tahun 2015. Dana Desa merupakan sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Ginting et al,2024).

Dana Desa pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Selain digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar, Dana Desa juga diarahkan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi produktif (Bose et al,2012). Melalui pemanfaatan Dana Desa, pemerintah berharap masyarakat desa dapat memperoleh kesempatan yang lebih luas dalam mengembangkan usaha ekonomi, meningkatkan keterampilan, memperluas akses terhadap sumber daya ekonomi, serta memperkuat kelembagaan ekonomi desa (Grimes,2003). Dengan demikian, Dana Desa diharapkan mampu menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Meskipun demikian, implementasi Dana Desa di berbagai wilayah masih menghadapi berbagai tantangan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan Dana Desa masih cenderung berfokus pada pembangunan fisik dibandingkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan tujuan Dana Desa sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat belum sepenuhnya tercapai (Lewis,2015). Permasalahan tersebut semakin kompleks di wilayah Indonesia Timur yang memiliki karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang berbeda dibandingkan wilayah lainnya.

Provinsi Papua Barat merupakan salah satu daerah yang masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan, terutama pada wilayah pesisir dan daerah terpencil. Sebagian besar masyarakat masih bergantung pada sektor primer seperti perikanan, pertanian, dan pemanfaatan hasil hutan. Namun demikian, keterbatasan akses terhadap permodalan, pasar, teknologi, serta infrastruktur ekonomi menyebabkan potensi sumber daya yang dimiliki belum mampu memberikan dampak optimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pemanfaatan Dana Desa sebagai instrumen yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan ekonomi produktif masyarakat. Kabupaten Teluk Wondama sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat memiliki karakteristik wilayah yang didominasi oleh kawasan pesisir dan kepulauan. Sebagian besar masyarakat menggantungkan mata pencaharian pada sektor perikanan, pertanian, dan usaha mikro skala rumah tangga (Ayalu et al,2023). Namun, aktivitas ekonomi masyarakat masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan, sarana perdagangan, dan kelembagaan ekonomi yang mampu mendukung pengembangan usaha masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2025, akses masyarakat terhadap lembaga keuangan formal di Distrik Wasior masih sangat terbatas. Dari seluruh desa yang ada di Distrik Wasior, hanya satu desa yang memiliki akses terhadap bank pemerintah, sedangkan bank swasta dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak tersedia sama sekali. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat desa masih mengalami kesulitan dalam memperoleh akses terhadap sumber permodalan formal yang dapat mendukung pengembangan usaha ekonomi produktif.

Selain itu, keberadaan lembaga ekonomi masyarakat juga masih relatif terbatas. Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2025 menunjukkan bahwa hanya terdapat empat koperasi aktif di Distrik Wasior dan seluruhnya bergerak pada bidang simpan pinjam. Sementara itu, koperasi yang berorientasi pada pengembangan sektor produksi seperti Koperasi Unit Desa (KUD) dan Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) belum tersedia. Kondisi tersebut mengakibatkan masyarakat belum memiliki wadah ekonomi yang mampu mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi lokal secara optimal.

Permasalahan serupa juga terlihat pada aspek pemasaran hasil usaha masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2025, jumlah sarana perdagangan di Distrik Wasior masih terbatas. Tercatat hanya terdapat tiga kelompok pertokoan, satu pasar permanen, satu pasar semi permanen, dan satu pasar tanpa bangunan. Keterbatasan sarana perdagangan tersebut menyebabkan distribusi dan pemasaran hasil produksi masyarakat menjadi kurang optimal sehingga berdampak pada rendahnya nilai tambah ekonomi yang diperoleh masyarakat. Salah satu wilayah yang menghadapi kondisi tersebut adalah Kampung Maimari yang berada di Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat. Kampung Maimari memiliki jumlah penduduk sekitar 337 jiwa dan berada pada kawasan pesisir yang memiliki potensi sumber daya alam cukup besar, terutama pada sektor perikanan laut, pertanian, hasil hutan, dan wisata alam. Selain itu, masyarakat Kampung Maimari juga memiliki modal sosial yang kuat berupa nilai gotong royong, solidaritas komunal, dan kepemimpinan adat yang masih terpelihara dengan baik.

Potensi yang dimiliki Kampung Maimari seharusnya dapat menjadi modal utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Akan tetapi, kondisi ekonomi masyarakat masih belum berkembang secara optimal. Sebagian besar masyarakat masih bekerja sebagai nelayan tradisional dan petani skala kecil dengan tingkat produktivitas yang relatif rendah. Keterbatasan akses terhadap modal usaha, sarana produksi, teknologi, pelatihan, dan pemasaran menyebabkan masyarakat belum mampu mengembangkan usaha ekonomi secara berkelanjutan. Akibatnya, pendapatan masyarakat masih sangat bergantung pada kondisi alam dan fluktuasi hasil produksi. Dalam kondisi tersebut, Dana Desa memiliki peran penting sebagai instrumen pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa diharapkan mampu mendukung pengembangan ekonomi produktif melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan usaha mikro masyarakat, pengembangan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam), serta penyediaan sarana pendukung kegiatan ekonomi produktif. Dengan demikian, Dana Desa dapat menjadi pendorong utama terciptanya kemandirian ekonomi masyarakat pesisir.

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa pemanfaatan Dana Desa di Kampung Maimari belum sepenuhnya optimal dalam mendukung pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat. Sebagian besar Dana Desa masih diarahkan pada pembangunan fisik seperti pembangunan jalan, penyediaan air bersih, dan pembangunan sarana dasar lainnya. Sementara itu, program-program yang berorientasi pada pengembangan ekonomi masyarakat seperti pelatihan usaha, penguatan UMKM, pengembangan kelompok usaha masyarakat, serta penguatan BUMKam masih memperoleh porsi yang relatif terbatas. Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2025 menunjukkan bahwa Dana Desa yang diterima Kampung Maimari pada tahun 2022 sebesar Rp1.020.000.000 lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar. Pada tahun 2023 Dana Desa sebesar Rp1.150.000.000 mulai diarahkan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelatihan UMKM. Selanjutnya pada tahun 2024 Dana Desa sebesar Rp1.075.000.000 digunakan untuk

pengembangan BUMKam dan sarana ekonomi produktif. Meskipun demikian, berbagai program pemberdayaan tersebut belum menunjukkan hasil yang optimal dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

Selain itu, masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kendala tersebut meliputi rendahnya kapasitas sumber daya manusia masyarakat dan aparatur kampung, terbatasnya akses terhadap modal dan pemasaran, belum optimalnya pengelolaan BUMKam, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan program (Wilson,1996). Kondisi tersebut menyebabkan program pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan antara tujuan Dana Desa sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan realitas pelaksanaannya di Kampung Maimari. Secara normatif, Dana Desa diarahkan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi produktif. Akan tetapi, dalam praktiknya pemanfaatan Dana Desa masih lebih dominan pada pembangunan fisik dibandingkan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai bagaimana optimalisasi pemanfaatan Dana Desa dalam pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat pesisir di Kampung Maimari, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi aktual pemanfaatan Dana Desa, sekaligus mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **"Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi Produktif Masyarakat Pesisir di Kampung Maimari Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat."**

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Pemanfaatan Dana Desa merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa secara berkelanjutan. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Dana Desa telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi desa. Namun, hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa efektivitas pemanfaatan Dana Desa dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat masih bervariasi di setiap wilayah. Kampung Maimari sebagai salah satu kampung pesisir di Kabupaten Teluk Wondama memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, terutama pada sektor perikanan, pertanian, hasil hutan, dan wisata alam. Potensi tersebut seharusnya dapat menjadi modal utama dalam pengembangan ekonomi produktif masyarakat. Akan tetapi, berdasarkan hasil observasi awal, pemanfaatan Dana Desa di Kampung Maimari masih lebih banyak difokuskan pada pembangunan infrastruktur fisik dibandingkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kondisi ini mengakibatkan potensi ekonomi lokal belum berkembang secara optimal dan belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara empiris, penelitian-penelitian terdahulu umumnya mengkaji Dana Desa dari aspek efektivitas pengelolaan, akuntabilitas penggunaan anggaran, transparansi, pembangunan infrastruktur, serta pengaruh Dana Desa terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi desa secara umum. Penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai keberhasilan maupun kendala implementasi Dana Desa, namun masih terdapat keterbatasan dalam menjelaskan bagaimana Dana Desa dapat

dioptimalkan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat, khususnya pada masyarakat pesisir. Kesenjangan penelitian (*research gap*) yang ditemukan terletak pada beberapa aspek. Pertama, sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada evaluasi penggunaan Dana Desa dan capaian program pembangunan, sedangkan penelitian yang secara khusus menganalisis optimalisasi pemanfaatan Dana Desa dalam pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat pesisir masih relatif terbatas. Kedua, penelitian terdahulu lebih banyak dilakukan pada wilayah pedesaan umum, sementara kajian mengenai pemanfaatan Dana Desa di kawasan pesisir dan kepulauan, khususnya di Papua Barat yang memiliki karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang berbeda, masih belum banyak dilakukan. Ketiga, penelitian sebelumnya cenderung menilai keberhasilan Dana Desa dari aspek output program, sedangkan kajian yang mengintegrasikan faktor kapasitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, akses terhadap sumber daya ekonomi, dan penguatan kelembagaan lokal sebagai indikator pemberdayaan ekonomi produktif masih terbatas.

Selain itu, terdapat kesenjangan teoritis antara tujuan kebijakan Dana Desa dan realitas implementasinya. Berdasarkan teori pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Anwas, keberhasilan pemberdayaan ditentukan oleh kemampuan masyarakat dalam meningkatkan kapasitas diri, memperluas akses terhadap sumber daya, memperkuat partisipasi, serta mengembangkan kelembagaan yang mendukung kemandirian ekonomi. Namun dalam praktiknya, pemanfaatan Dana Desa di Kampung Maimari masih didominasi oleh pembangunan fisik sehingga aspek-aspek pemberdayaan tersebut belum berkembang secara optimal. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan antara konsep pemberdayaan yang diharapkan dalam kebijakan Dana Desa dengan kondisi aktual yang terjadi di lapangan. Berdasarkan kesenjangan empiris, teoritis, dan kontekstual tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan kajian mengenai optimalisasi pemanfaatan Dana Desa dalam pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat pesisir di Kampung Maimari Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat. Penelitian ini berfokus pada empat aspek utama, yaitu kapasitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, akses terhadap sumber daya ekonomi, dan penguatan kelembagaan lokal, sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Dana Desa pada wilayah pesisir.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian mengenai optimalisasi pemanfaatan Dana Desa dalam pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat pesisir di Kampung Maimari Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat penting untuk dilakukan mengingat Dana Desa merupakan instrumen utama pemerintah dalam mendorong pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah mengalokasikan Dana Desa dalam jumlah yang cukup besar kepada seluruh desa dan kampung di Indonesia, termasuk Kampung Maimari. Namun, besarnya alokasi Dana Desa tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya pada wilayah pesisir yang masih menghadapi berbagai keterbatasan akses permodalan, pemasaran, teknologi, serta kelembagaan ekonomi lokal. Secara keilmuan, penelitian ini penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana pemanfaatan Dana Desa dapat dioptimalkan dalam mendukung pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat pesisir. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan Dana Desa pada wilayah pesisir yang memiliki karakteristik

geografis, sosial, dan ekonomi yang berbeda dibandingkan wilayah pedesaan lainnya. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori pemberdayaan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, akses terhadap sumber daya, dan penguatan kelembagaan lokal.

Dari aspek permasalahan, penelitian ini menjadi penting karena masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi produktif di Kampung Maimari. Meskipun Dana Desa telah dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, hasil observasi menunjukkan bahwa pemanfaatannya masih lebih dominan pada pembangunan fisik dibandingkan pengembangan ekonomi produktif masyarakat. Di sisi lain, masyarakat masih menghadapi berbagai permasalahan seperti rendahnya kapasitas sumber daya manusia, terbatasnya akses terhadap modal usaha dan pemasaran, belum optimalnya pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam), serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan program. Kondisi tersebut berpotensi menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi efektivitas Dana Desa sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Secara praktis, penelitian ini penting sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kampung Maimari, Pemerintah Distrik Wasior, Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, serta instansi terkait dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan program pemberdayaan ekonomi yang lebih tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat pesisir. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi dalam upaya peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan kelembagaan ekonomi kampung, pengembangan BUMKam, serta perluasan akses masyarakat terhadap permodalan dan pemasaran hasil usaha.

Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka pemerintah dan pemangku kepentingan akan mengalami keterbatasan informasi empiris mengenai kondisi aktual pemanfaatan Dana Desa dalam pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat pesisir di Kampung Maimari. Akibatnya, perumusan kebijakan dan program pemberdayaan ekonomi berisiko kurang tepat sasaran, kurang efektif, dan tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan potensi ekonomi yang dimiliki Kampung Maimari belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga tujuan Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan, kemandirian ekonomi, dan pembangunan masyarakat pesisir secara berkelanjutan menjadi sulit untuk diwujudkan.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang membahas pemanfaatan Dana Desa, pengelolaan keuangan desa, pemberdayaan masyarakat, pengembangan UMKM, serta penguatan kelembagaan ekonomi desa. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Dana Desa memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pengembangan ekonomi produktif melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat. Purwadinata et al. (2024) mengkaji pemanfaatan Dana Desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dari perspektif keuangan daerah dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pemanfaatan Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Fokus penelitian mereka lebih menitikberatkan pada aspek pengelolaan keuangan daerah, sedangkan penelitian ini berfokus pada optimalisasi pemanfaatan Dana Desa dalam pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat pesisir di Kampung Maimari (Purwadinata et al., 2024). Fitriasuri & Sari (2025) mengkaji sosialisasi serta optimalisasi UMKM, BUMDes, dan pengelola Dana Desa melalui

pengelolaan keuangan desa dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi pengelolaan keuangan desa mampu meningkatkan efisiensi dan kemandirian ekonomi masyarakat. Berbeda dengan penelitian ini yang menelaah implementasi pemanfaatan Dana Desa secara langsung di masyarakat, penelitian tersebut lebih berorientasi pada kegiatan sosialisasi dan pelatihan (Fitriasuri & Sari, 2025). Putri et al. mengkaji pengaruh akuntabilitas dan kinerja pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi alokasi Dana Desa menggunakan metode kuantitatif regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat meskipun kinerja aparatur desa masih perlu ditingkatkan. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses pemberdayaan ekonomi masyarakat (Putri et al., 2024). Syauket & Indriasari (2024) meneliti optimalisasi penggunaan Dana Desa yang mendorong Desa Kutuh, Badung, Bali menjadi Smart Village melalui pendekatan studi kasus kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dan pengelolaan potensi lokal mampu meningkatkan kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat desa. Penelitian tersebut dilakukan pada desa yang telah berkembang dengan dukungan teknologi digital, sedangkan penelitian ini berfokus pada kampung pesisir di Papua Barat yang masih menghadapi keterbatasan akses ekonomi dan infrastruktur pendukung (Syauket & Indriasari, 2024). Ilmawan mengkaji optimalisasi pengelolaan alokasi Dana Desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan masyarakat mampu meningkatkan potensi ekonomi lokal. Persamaan penelitian ini terletak pada fokus pengembangan ekonomi masyarakat melalui Dana Desa, sedangkan perbedaannya terletak pada karakteristik wilayah penelitian yang berbeda (Ilmawan, 2024). Astuty et al. (2024) meneliti upaya inovatif peningkatan ekonomi lokal melalui optimalisasi UMKM Opak di Desa Paya Bengkuang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan UMKM mampu meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Meskipun sama-sama membahas pemberdayaan ekonomi masyarakat, penelitian tersebut lebih berfokus pada pengembangan UMKM dan tidak secara khusus mengkaji pemanfaatan Dana Desa sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi (Astuty et al., 2024). Rumailili et al (2024) mengkaji optimalisasi pemanfaatan Dana Desa dalam pembiayaan program pemberdayaan masyarakat di Desa Ilili, Kecamatan Kesuy Watubela, Kabupaten Seram Bagian Timur menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat apabila diarahkan pada kegiatan ekonomi produktif. Penelitian ini memiliki kesamaan fokus pada optimalisasi Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat, namun berbeda dari segi lokasi dan karakteristik sosial ekonomi masyarakat yang diteliti (Rumailili et al, 2024).

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian membahas pengelolaan Dana Desa dari aspek akuntabilitas, pengelolaan keuangan desa, pembangunan desa, pengembangan UMKM, dan pemberdayaan masyarakat secara umum. Namun, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji optimalisasi pemanfaatan Dana Desa dalam pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat pesisir dengan menggunakan perspektif pemberdayaan masyarakat yang mencakup kapasitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, akses terhadap sumber daya, dan penguatan kelembagaan lokal. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan pada fokus kajian yang menelaah secara mendalam bagaimana Dana Desa dimanfaatkan

untuk mendorong pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat pesisir di Kampung Maimari Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki unsur kebaruan ilmiah (*scientific novelty*) yang dapat dilihat dengan membandingkan penelitian yang dilakukan dengan beberapa penelitian terdahulu. Dibandingkan dengan penelitian Purwadinata et al. (2024) yang berfokus pada pemanfaatan Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari perspektif pengelolaan keuangan daerah, penelitian ini memiliki kebaruan pada fokus kajian yang menelaah optimalisasi pemanfaatan Dana Desa dalam pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat pesisir. Selain itu, penelitian ini menggunakan perspektif pemberdayaan masyarakat yang lebih menekankan pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, akses terhadap sumber daya, dan penguatan kelembagaan lokal. Dibandingkan dengan penelitian Fitriasuri dan Sari (2025) yang mengkaji sosialisasi dan optimalisasi UMKM, BUMDes, serta pengelolaan Dana Desa melalui pelatihan pengelolaan keuangan desa, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis implementasi pemanfaatan Dana Desa secara langsung dalam kegiatan ekonomi produktif masyarakat. Penelitian ini tidak hanya menilai aspek pelatihan dan sosialisasi, tetapi juga mengkaji dampaknya terhadap proses pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.

Dibandingkan dengan penelitian Putri et al. (2024) yang menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas dan kinerja pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat, penelitian ini memiliki kebaruan pada penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif yang memungkinkan peneliti menggali secara mendalam proses pemanfaatan Dana Desa, hambatan yang dihadapi, serta strategi optimalisasi pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat. Dibandingkan dengan penelitian Syauket dan Indriasari (2024) yang mengkaji optimalisasi Dana Desa dalam mewujudkan Smart Village di Desa Kutuh, Bali, kebaruan penelitian ini terletak pada konteks wilayah penelitian yang berbeda. Penelitian ini dilakukan pada kampung pesisir di Papua Barat yang memiliki karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang berbeda, sehingga menghasilkan perspektif baru mengenai pemanfaatan Dana Desa pada wilayah dengan keterbatasan akses dan infrastruktur ekonomi. Dibandingkan dengan penelitian Ilmawan (2024) yang membahas optimalisasi pengelolaan alokasi Dana Desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan, penelitian ini memiliki kebaruan pada penggunaan dimensi pemberdayaan masyarakat menurut Anwas (2014) sebagai kerangka analisis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat hasil program, tetapi juga menilai proses pemberdayaan melalui peningkatan kapasitas masyarakat, akses sumber daya, partisipasi, dan penguatan kelembagaan.

Dibandingkan dengan penelitian Astuty et al. (2024) yang berfokus pada pengembangan UMKM sebagai upaya peningkatan ekonomi lokal, kebaruan penelitian ini terletak pada objek kajian yang menempatkan Dana Desa sebagai instrumen utama pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat. Penelitian ini tidak hanya mengkaji pengembangan usaha masyarakat, tetapi juga menganalisis peran Dana Desa dalam mendukung keberlanjutan usaha tersebut. Dibandingkan dengan penelitian Rumailili et al. (2024) yang meneliti optimalisasi pemanfaatan Dana Desa dalam pembiayaan program pemberdayaan masyarakat, kebaruan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang secara spesifik mengkaji masyarakat pesisir serta menganalisis pemberdayaan ekonomi produktif berdasarkan empat dimensi pemberdayaan masyarakat menurut Anwas, yaitu kapasitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, akses terhadap sumber daya, dan penguatan kelembagaan lokal. Secara keseluruhan,

kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara khusus menganalisis optimalisasi pemanfaatan Dana Desa dalam pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat pesisir di Kampung Maimari Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat dengan menggunakan perspektif pemberdayaan masyarakat menurut Anwas (2014). Penelitian ini juga memberikan kontribusi empiris karena dilakukan pada wilayah pesisir Papua Barat yang masih relatif jarang menjadi lokasi penelitian terkait pemanfaatan Dana Desa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

1.6. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi pemanfaatan Dana Desa dalam pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat pesisir di Kampung Maimari, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam proses optimalisasi pemanfaatan Dana Desa dalam pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat pesisir di Kampung Maimari Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti melalui penggalian informasi secara langsung dari para pelaku yang terlibat dalam pemanfaatan Dana Desa. Selain itu, pendekatan studi kasus dipilih karena penelitian berfokus pada satu lokasi tertentu yang memiliki karakteristik khas, yaitu kampung pesisir dengan potensi ekonomi lokal yang besar namun masih menghadapi berbagai kendala dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan serta pemanfaatan Dana Desa di Kampung Maimari. Informan penelitian terdiri atas Kepala Kampung Maimari, Sekretaris Kampung, Bendahara Kampung, Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), Pendamping Desa, tokoh adat, tokoh agama, pelaku UMKM, nelayan, dan masyarakat penerima manfaat Dana Desa. Kepala Kampung Maimari ditetapkan sebagai informan kunci karena memiliki kewenangan utama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengambilan keputusan terkait penggunaan Dana Desa sehingga memiliki informasi yang paling lengkap mengenai program pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan. Sementara itu, informan lainnya dipilih untuk memperoleh perspektif yang beragam dari sisi pengelola program, pengawas, pendamping, pelaku usaha, serta masyarakat sebagai penerima manfaat.

Teknik pengujian keabsahan data dilakukan melalui uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kredibilitas data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, serta triangulasi teknik dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Transferabilitas dilakukan melalui penyajian deskripsi penelitian secara rinci sehingga memungkinkan hasil penelitian dipahami dalam konteks yang serupa. Dependabilitas dan konfirmabilitas dilakukan dengan mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara sistematis sehingga data dan hasil penelitian dapat ditelusuri serta

dipertanggungjawabkan. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif sehingga memudahkan peneliti dalam memahami hubungan antar temuan. Tahap terakhir dilakukan dengan penarikan kesimpulan berdasarkan pola, tema, dan hubungan yang ditemukan selama proses penelitian. Analisis data dilakukan dengan mengacu pada teori pemberdayaan masyarakat menurut Anwas yang meliputi dimensi kapasitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, akses terhadap sumber daya, dan penguatan kelembagaan lokal. Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Maimari, Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat. Lokasi tersebut dipilih karena merupakan salah satu kampung pesisir yang menerima Dana Desa dan memiliki potensi ekonomi lokal yang cukup besar, namun masih menghadapi berbagai permasalahan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pengumpulan data dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan, yaitu pada bulan Januari sampai Maret 2026 yang mencakup kegiatan observasi lapangan, wawancara mendalam dengan informan, pengumpulan dokumentasi, serta analisis data penelitian. Dengan rentang waktu tersebut, penelitian diharapkan mampu menggambarkan secara aktual proses optimalisasi pemanfaatan Dana Desa dalam pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat pesisir di Kampung Maimari.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis optimalisasi pemanfaatan Dana Desa untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kampung Maimari Kabupaten Teluk Wondama dengan menggunakan konsep optimalisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pembahasan dalam penelitian ini mengacu pada tahapan pengelolaan Dana Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Adapun uraian hasil analisis tersebut dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Proses Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kampung Maimari Kabupaten Teluk Wondama

Optimalisasi pemanfaatan Dana Desa merupakan upaya untuk memaksimalkan penggunaan dana yang tersedia agar dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, optimalisasi tidak hanya dilihat dari aspek penyerapan anggaran, tetapi juga dari sejauh mana program yang dijalankan mampu meningkatkan kapasitas, kemandirian, serta produktivitas masyarakat. Proses optimalisasi pemanfaatan Dana Desa di Kampung Maimari mencakup rangkaian tahapan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Secara ideal, keempat tahapan tersebut harus berjalan secara terintegrasi agar Dana Desa benar-benar mampu mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian, proses optimalisasi tersebut belum berjalan secara maksimal karena masih terdapat berbagai kelemahan pada setiap tahapan. Pada tahap perencanaan, proses penyusunan program Dana Desa belum sepenuhnya berjalan optimal. Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah kampung masih tergolong rendah sehingga proses perencanaan lebih banyak didominasi oleh aparat kampung. Kondisi ini menyebabkan aspirasi masyarakat belum terserap secara maksimal dalam penentuan prioritas program. Selain itu, arah perencanaan masih cenderung berfokus pada pembangunan fisik seperti infrastruktur dasar dan fasilitas umum, sedangkan program yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti pelatihan keterampilan, pengembangan usaha kecil, dan penguatan kelembagaan ekonomi kampung masih belum menjadi

prioritas utama. Akibatnya, perencanaan belum sepenuhnya berbasis pada kebutuhan riil masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Pada tahap pelaksanaan, pemanfaatan Dana Desa di Kampung Maimari masih didominasi oleh kegiatan pembangunan fisik. Sementara itu, program yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat masih sangat terbatas dan belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Program pemberdayaan yang telah dijalankan juga belum berlangsung secara berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pendampingan, minimnya pelatihan, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap modal dan pasar. Di sisi lain, keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program masih rendah, karena masyarakat lebih banyak berperan sebagai penerima manfaat dibandingkan sebagai pelaku utama dalam kegiatan ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan belum berjalan secara partisipatif dan belum mampu membangun kemandirian ekonomi masyarakat secara optimal. Pada tahap pengawasan, pelaksanaan pengendalian terhadap Dana Desa belum berjalan secara efektif. Pengawasan yang dilakukan masih cenderung bersifat administratif, yaitu hanya berfokus pada kelengkapan laporan dan kesesuaian administrasi keuangan, tanpa disertai penilaian yang mendalam terhadap dampak program bagi masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses informasi, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai peran pengawasan, serta budaya sosial yang masih cenderung menyerahkan sepenuhnya urusan pemerintahan kepada aparat kampung. Kondisi tersebut menyebabkan fungsi kontrol sosial tidak berjalan optimal, sehingga kelemahan dalam pelaksanaan program tidak segera terdeteksi dan diperbaiki. Selain itu, transparansi informasi terkait penggunaan Dana Desa juga belum berjalan dengan baik, sehingga terjadi kesenjangan informasi antara pemerintah kampung dan masyarakat.

Pada tahap evaluasi, proses penilaian terhadap pelaksanaan program Dana Desa juga belum berjalan secara optimal. Evaluasi yang dilakukan masih terbatas pada aspek administratif dan output, seperti realisasi kegiatan dan penyerapan anggaran, tanpa menyentuh aspek yang lebih penting yaitu dampak program terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Evaluasi berbasis hasil (outcome), seperti peningkatan pendapatan masyarakat, perkembangan usaha ekonomi, serta peningkatan kapasitas masyarakat, belum dilakukan secara sistematis. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi masih sangat terbatas, padahal masyarakat merupakan pihak yang paling merasakan dampak dari program yang dilaksanakan. Lebih lanjut, hasil evaluasi yang ada belum ditindaklanjuti secara konkret dalam bentuk perbaikan program, sehingga kelemahan yang sama cenderung berulang dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi evaluasi sebagai sarana pembelajaran dan perbaikan program belum berjalan sebagaimana mestinya. Proses optimalisasi pemanfaatan Dana Desa di Kampung Maimari belum berjalan secara maksimal. Hal ini terlihat dari belum terintegrasinya seluruh tahapan pengelolaan Dana Desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi, yang masih memiliki berbagai kelemahan sehingga belum mampu secara optimal mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.

3.2. Peran Pemerintah Kampung dan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Mengoptimalkan Pemanfaatan Dana Desa

Peran pemerintah kampung dan tingkat partisipasi masyarakat merupakan dua elemen kunci yang saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan optimalisasi pemanfaatan Dana Desa, khususnya dalam mendorong kegiatan ekonomi produktif di Kampung Maimari. Kedua aspek ini tidak

dapat dipisahkan, karena pemerintah kampung berfungsi sebagai penggerak utama kebijakan dan pelaksana program, sementara masyarakat merupakan subjek sekaligus pelaku utama dalam proses pemberdayaan. Secara teoritis, keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat ditentukan oleh kualitas pelaksana kebijakan dalam menjalankan fungsi-fungsi seperti efektivitas, efisiensi, serta ketepatan sasaran program. Dalam konteks ini, pemerintah kampung memiliki peran strategis tidak hanya sebagai pengelola anggaran, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, dan katalisator dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat agar Dana Desa dapat memberikan dampak yang optimal.

Berdasarkan hasil penelitian, peran pemerintah kampung dalam mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa di Kampung Maimari masih belum berjalan secara maksimal. Dalam tahap perencanaan, pemerintah kampung masih cenderung menggunakan pendekatan yang bersifat top-down, sehingga meskipun musyawarah kampung telah dilaksanakan, proses penentuan program masih didominasi oleh aparat kampung. Kondisi ini menyebabkan program yang dihasilkan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam pengembangan ekonomi produktif. Pada tahap pelaksanaan, pemerintah kampung masih lebih memprioritaskan kegiatan pembangunan fisik dibandingkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Alokasi Dana Desa lebih banyak diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar, sementara kegiatan yang berkaitan dengan penguatan usaha ekonomi masyarakat masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi pembangunan belum sepenuhnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Selanjutnya, dalam aspek pemberdayaan, peran pemerintah kampung sebagai fasilitator masih belum optimal. Kegiatan seperti pelatihan, pendampingan, serta penguatan kapasitas masyarakat masih sangat terbatas. Akibatnya, masyarakat belum memiliki kemampuan yang memadai untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif secara mandiri. Selain itu, dalam aspek kelembagaan, pemerintah kampung juga belum mampu mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) sebagai lembaga ekonomi desa. BUMKam yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi lokal belum berfungsi secara maksimal sehingga potensi ekonomi kampung belum dapat dikembangkan secara optimal. Di sisi lain, tingkat partisipasi masyarakat di Kampung Maimari juga masih tergolong rendah. Dalam tahap perencanaan, keterlibatan masyarakat dalam musyawarah kampung masih terbatas, baik dari segi kehadiran maupun kontribusi pemikiran. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya pemahaman mengenai pentingnya partisipasi, serta keterbatasan akses informasi terhadap proses perencanaan pembangunan.

Dalam tahap pelaksanaan, masyarakat cenderung hanya berperan sebagai penerima manfaat, bukan sebagai pelaku utama dalam kegiatan ekonomi yang dikembangkan. Program pemberdayaan yang ada belum mampu mendorong perubahan peran masyarakat menjadi lebih aktif dalam kegiatan produktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan belum berhasil membangun kemandirian ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Sementara itu, dalam tahap pengawasan, partisipasi masyarakat juga masih sangat minim. Masyarakat belum terlibat secara aktif dalam mengawasi penggunaan Dana Desa, sehingga fungsi kontrol sosial belum berjalan dengan baik. Lemahnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan ini menyebabkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa belum dapat terwujud secara optimal. Secara konseptual, partisipasi masyarakat merupakan inti dari proses pemberdayaan. Tanpa adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan, maka program pemberdayaan tidak akan berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Rendahnya partisipasi masyarakat di Kampung Maimari menunjukkan bahwa

proses optimalisasi pemanfaatan Dana Desa masih belum mencapai hasil yang diharapkan, karena baik dari sisi pemerintah kampung maupun masyarakat belum berjalan secara sinergis dalam mendorong pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian mengenai optimalisasi pemanfaatan Dana Desa untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kampung Maimari menunjukkan bahwa proses pengelolaan Dana Desa belum berjalan secara optimal pada seluruh tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Secara umum, temuan penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa masih lebih dominan digunakan untuk pembangunan fisik dibandingkan dengan pengembangan ekonomi masyarakat. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya peningkatan kapasitas, kemandirian, serta kesejahteraan ekonomi masyarakat. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya optimalisasi Dana Desa disebabkan oleh masih terbatasnya partisipasi masyarakat, lemahnya peran pemerintah kampung sebagai fasilitator pemberdayaan, serta belum optimalnya fungsi kelembagaan ekonomi kampung seperti BUMKam. Selain itu, pengawasan yang masih bersifat administratif serta evaluasi yang belum berbasis pada dampak (outcome) menyebabkan program belum mampu memberikan perubahan signifikan terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan dana desa sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan (Daraba,2017). Sama halnya dengan temuan penelitian yang menekankan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci utama dalam keberhasilan program pemberdayaan, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek pembangunan. Dalam konteks Kampung Maimari, kondisi partisipasi masyarakat yang masih rendah menunjukkan bahwa prinsip pemberdayaan belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya (Faisal & Nain,2018). Selain itu, temuan penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa peran pemerintah desa atau kampung sebagai fasilitator sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan ekonomi. Pemerintah kampung tidak hanya berperan sebagai pelaksana anggaran, tetapi juga harus mampu mendorong tumbuhnya usaha ekonomi masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, serta penguatan kelembagaan ekonomi lokal (Diatmika & Rahayu,2022). Namun dalam penelitian ini ditemukan bahwa peran tersebut masih belum optimal, sehingga hasilnya belum mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat secara signifikan.

Berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa Dana Desa mampu meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha produktif dan penguatan BUMDes/BUMKam, temuan penelitian di Kampung Maimari menunjukkan bahwa orientasi penggunaan Dana Desa masih lebih dominan pada pembangunan infrastruktur fisik. Perbedaan ini menunjukkan bahwa karakteristik implementasi kebijakan di setiap wilayah sangat dipengaruhi oleh kapasitas pemerintah lokal, tingkat partisipasi masyarakat, serta prioritas perencanaan pembangunan di tingkat kampong (Pitono et al,2023). Temuan ini juga menolak sebagian hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pengelolaan Dana Desa yang baik selalu diikuti dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Fathony et al,2019). Dalam konteks Kampung Maimari, meskipun Dana Desa telah dialokasikan setiap tahun, dampaknya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat masih belum signifikan. Hal ini disebabkan oleh belum terintegrasinya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dalam satu sistem pemberdayaan yang utuh (Kartiwi et al,2022).

Selanjutnya, temuan ini memperkuat penelitian sebelumnya yang menekankan bahwa evaluasi berbasis outcome sangat penting dalam menilai keberhasilan program pembangunan desa. Evaluasi

yang hanya berfokus pada aspek administratif dan output tidak cukup untuk mengukur dampak nyata terhadap masyarakat (Supriadi et al,2025). Dalam penelitian ini ditemukan bahwa evaluasi yang belum berbasis dampak menyebabkan perbaikan program tidak berjalan secara berkelanjutan, sehingga kelemahan yang sama terus berulang setiap tahun (Pitono et al,2021). Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi Dana Desa di Kampung Maimari masih menghadapi tantangan utama berupa rendahnya partisipasi masyarakat, belum optimalnya peran pemerintah kampung sebagai fasilitator pemberdayaan, serta lemahnya sistem evaluasi berbasis hasil. Kondisi ini menyebabkan Dana Desa belum sepenuhnya mampu menjadi instrumen utama dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan (Pitono et al,2024).

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Selain temuan utama penelitian, penulis juga menemukan beberapa temuan menarik lainnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi optimalisasi pemanfaatan Dana Desa di Kampung Maimari, khususnya dalam aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat. Salah satu temuan penting adalah masih adanya faktor penghambat dalam proses optimalisasi Dana Desa, terutama yang berkaitan dengan rendahnya partisipasi masyarakat. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu keterbatasan waktu atau kesibukan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan dalam pembangunan desa, serta kurangnya akses informasi yang menyebabkan masyarakat tidak sepenuhnya memahami program-program yang dijalankan pemerintah kampung. Faktor-faktor tersebut berdampak pada minimnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan program Dana Desa. Selain faktor penghambat, penelitian ini juga menemukan bahwa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat kampung menjadi salah satu kendala dalam optimalisasi pemanfaatan Dana Desa. Baik aparat kampung maupun masyarakat masih memerlukan peningkatan kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan program pemberdayaan ekonomi. Hal ini menyebabkan program yang dirancang belum sepenuhnya mampu diarahkan pada kegiatan ekonomi produktif yang berkelanjutan. Temuan lainnya menunjukkan bahwa sarana dan prasarana pendukung kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat masih belum memadai. Keterbatasan akses terhadap modal usaha, pelatihan, serta pendampingan menyebabkan masyarakat sulit untuk mengembangkan usaha secara mandiri. Kondisi ini memperkuat bahwa optimalisasi Dana Desa tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga pada kesiapan infrastruktur pendukung pemberdayaan. Di sisi lain, terdapat faktor pendukung yang turut membantu proses optimalisasi, yaitu adanya struktur kelembagaan kampung yang sudah terbentuk serta adanya komitmen pemerintah kampung dalam menjalankan program pembangunan. Meskipun belum optimal, keberadaan lembaga seperti BPK dan BUMKam menjadi modal dasar yang dapat dikembangkan untuk memperkuat sistem pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kampung Maimari ke depan. Secara keseluruhan, temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan optimalisasi Dana Desa tidak hanya ditentukan oleh perencanaan dan pelaksanaan program, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia, tingkat partisipasi masyarakat, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa optimalisasi pemanfaatan Dana Desa untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kampung Maimari Kabupaten Teluk Wondama belum berjalan secara optimal.

Hal ini ditandai dengan masih dominannya penggunaan Dana Desa untuk pembangunan fisik dibandingkan pengembangan ekonomi produktif masyarakat, rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan, serta belum optimalnya peran pemerintah kampung dalam menjalankan fungsi pemberdayaan. Selain itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat belum berkembang secara maksimal karena keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, minimnya pelatihan dan pendampingan, terbatasnya akses modal dan pemasaran, serta belum optimalnya kelembagaan ekonomi kampung seperti BUMKam dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa optimalisasi pemanfaatan Dana Desa di Kampung Maimari belum sepenuhnya mampu menjawab tujuan penelitian, yaitu meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, sehingga masih diperlukan penguatan pada aspek partisipasi masyarakat, peran pemerintah kampung, serta pengembangan kelembagaan ekonomi lokal.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama pada aspek waktu dan biaya penelitian sehingga proses penggalian data belum dapat dilakukan secara lebih mendalam dan menyeluruh di seluruh unsur masyarakat Kampung Maimari. Selain itu, penelitian ini juga hanya dilakukan pada satu kampung sebagai studi kasus, sehingga hasil penelitian ini tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan pada wilayah lain, melainkan hanya menggambarkan kondisi spesifik pada lokasi penelitian sebagaimana pendekatan studi kasus yang dikemukakan oleh Creswell.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih bersifat awal dan terbatas, sehingga diperlukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada lokasi serupa maupun pada kampung lain di Kabupaten Teluk Wondama. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas fokus kajian tidak hanya pada aspek optimalisasi Dana Desa, tetapi juga pada efektivitas program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, peran kelembagaan ekonomi kampung seperti BUMKam, serta strategi peningkatan partisipasi masyarakat agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Kampung Maimari beserta seluruh jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung proses penelitian ini hingga selesai. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Kampung Maimari yang telah berpartisipasi dan memberikan informasi sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Anwas, O. M. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*.

Astuty, D. A., Maharani, P. N., Triany, M., Pratama, A. A., Amanda, C. A., Tarigan, H. S., & Azri, N. I. (2024). Upaya inovatif peningkatan ekonomi lokal melalui optimalisasi umkm opak di desa paya bengkuang. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, *5*(4), 5258-5266. http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/4071

Ayalu, G., Abbay, A. G., & Azadi, H. (2023). The role of micro-and small-scale enterprises in enhancing sustainable community livelihood: Tigray, Ethiopia: G. Ayalu et al. *Environment, Development and Sustainability*, *25*(8), 7561-7584. https://link.springer.com/article/10.1007/s10668-022-02359-7

Bose, A., Ramji, A., Singh, J., & Dholakia, D. (2012). A case study for sustainable development action using financial gradients. *Energy Policy*, *47*, 79-86. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421512002431

Daraba, D. (2017). Pengaruh program dana desa terhadap tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. *Sosiohumaniora*, *19*(1), 52-58. http://eprints.ipdn.ac.id/5381/

Diatmika, I. P. G., & Rahayu, S. (2022). *Model pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal dan peran pemerintah*. Ahlimedia Book.

Faisal, M., & Nain, U. (2018). Implikasi program dana desa terhadap kohesi sosial di desa tamalate kabupaten takalar. *Sosiohumaniora-Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*, *20*(3), 222-230. http://eprints.ipdn.ac.id/5745/

Fathony, A. A., Iqbal, M., & Sopian, A. (2019). Pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. *Akurat| Jurnal Ilmiah Akuntansi Fe Unibba*, *10*(3), 41-57. https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/akurat/article/view/182

Fitriasuri, F., & Sari, I. R. (2025). Sosialisasi Serta Optimalisasi Umkm, Bumdes Dan Pengelola Dana Desa Melalui Pengelolaan Keuangan Desa Tanjung Laut. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, *5*(1), 309-318. https://doi.org/10.31004/jh.v5i1.2203

Ginting, A. H., Widianingsih, I., Mulyawan, R., & Nurasa, H. (2024). Village fund program in Cibeureum and Sukapura village, Bandung Regency, Indonesia: Problems, risks, and solutions. *Cogent Social Sciences*, *10*(1), 2303452. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/23311886.2024.2303452

Grimes, S. (2003). The digital economy challenge facing peripheral rural areas. *Progress in Human Geography*, *27*(2), 174-193. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1191/0309132503ph421oa

Ilmawan, M. Y. (2024). Optimalisasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin Menurut Perspektif Ekonomi Syariah. *Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin*. https://idr.uin-antasari.ac.id/27507/2/AWAL.pdf

Kartiwi, K., Pitono, A., Arwanto, A., & Baidhowah, A. R. (2022). Inovasi Dan Pembangunan Desa Di Kabupaten Gunungkidul: Inklusivitas Kesejahteeraan Dan Kesetaraan Gender. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, *7*(1), 59-81. http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1432/

Lewis, B. D. (2015). Decentralising to villages in Indonesia: Money (and other) mistakes. *Public Administration and development*, *35*(5), 347-359. https://doi.org/10.1002/pad.1741

Nainggolan, D. A., Haloho, A. N., Purba, J., & Ginting, M. (2022). Implikasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Terhadap Pembangunan (Studi Kasus Di Desa Hutauruk Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara). *Jurnal Regional Planning*, *4*(2), 96-114. http://jurnal.usi.ac.id/index.php/jrp/article/view/556

Pitono, A., Harahap, A. S., Kartiwi, K., & Baidhowah, A. R. (2023). Informal Institutions, Government Regulatory Functions, and Development of Governance Studies. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, *16*(2), 107-123. http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1441/

Pitono, A., Kartiwi, K., & Baidhowah, A. R. (2021). Internalisasi Agile Organizations Dalam Penyederhanaan Eselonisasi Untuk Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, *14*(1), 46-69. http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1429/

Pitono, A., Sutiyo, S., & Baidhowah, A. R. (2024). Customary Land Tenure and Landless Farmers in Java, Indonesia: The Challenges and Prospects for Sustainable Development. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, *18*(7), 1-18. http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1450/

Putri, B. N., Dewi, M. W., & Pratiwi, D. N. (2024). Optimalisasi alokasi dana desa: Pengaruh akuntabilitas dan kinerja pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, *3*(3), 597-604. https://doi.org/10.53088/jikab.v3i3.105

Rumailili, M. F., Sahetapy, P., Pattimukay, H., & Selanno, H. (2024). Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa Dalam pembiayaan Program pemberdayaan Masyarakat Desa Ilili Kecamatan Kesuy Watubela Kabupaten Seram Bagian Timur. *Jurnal Ilmiah Global Education*, *5*(1), 123-137. https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.2302

Salahudin, S. (2022). Pengembangan dan Percepatan Pencapaian Tujuan Pemerataan Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, *3*(2), 674-695. http://journal.stisipolrajahaji.ac.id/index.php/jisipol/article/view/71

Supriadi, W., Pramudiana, I. D., & Pramono, S. (2025). Evaluasi Kebijakan Pembangunan Pamsimas di Desa Lubuk Ulak Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, *2*(2), 136-145. https://doi.org/10.62383/humif.v2i2.1503

Syauket, A., & Indriasari, R. (2024). Optimalisasi Penggunaan Dana Desa Membawa Desa Kutuh-Badung-Bali Menjadi Smart Village. *Jurnal Kajian Ilmiah*, *24*(2), 101-114. https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/JKI/article/download/1937/1600

Wilson, P. A. (1996). Empowerment: Community economic development from the inside out. *Urban Studies*, *33*(4-5), 617-630. https://doi.org/10.1080/00420989650011753